

TPU Madurejo Dilengkapi Fasilitas Krematorium

PRAMBANAN (KR) - Tempat Pemakaman Umum (TPU) Madurejo Prambanan kini dilengkapi dengan krematorium. Penambahan fasilitas hasil kerja sama antara Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Pemkab Sleman ini diresmikan Bupati Sleman Sri Purnomo, Selasa (13/10). Adanya krematorium ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Hindu di Sleman dan sekitarnya dalam melakukan prosesi kremasi sesuai ajaran agama dan kepercayaannya.

Bupati Sri Purnomo menyebut, pemilihan lokasi krematorium tersebut sudah sangat sesuai dengan konsep ajaran Hindu sebab berada di kompleks TPU. Hal ini tergolong istimewa, bahkan sangat jarang ada sebuah krematorium yang

letaknya menjadi satu dengan tempat pemakaman umum yang lain.

"Bagi umat Hindu yang mampu mungkin bisa melakukan kremasi secara mandiri. Tapi bagi yang kurang mampu, mungkin nanti bisa dibantu melalui kerja sama antara PHDI

dengan Dinas PUPKP Kabupaten Sleman," tambah Bupati.

Sementara Ketua PHDI Kabupaten Sleman Anak Agung Alit Mertayasa mengaku bahagia dengan adanya krematorium TPU Madurejo ini. Umat Hindu di DIY, khususnya di Kabupaten Sleman, telah lama menginginkan bisa memiliki krematorium sendiri sehingga dapat melakukan proses kremasi secara leluasa. Sebab selama ini umat Hindu di Sleman dan sekitarnya meminjam fasilitas kremasi milik Kelompok Kematian Yogyakarta

yang ada di daerah Pingit. "Untuk pembangunan fisik krematorium ini kita kumpulkan donasi dari berbagai pihak, dan berhasil terkumpul dana kurang lebih Rp 1,4 miliar," katanya.

Bangunan krematorium ini berdiri di atas lahan seluas 1.000 meter persegi, dengan kelengkapan bangunan utama, 2 tungku pengabuan jenazah, bale pawedan, sanggah surya, toilet, gudang, bangunan pelinggih, tempat penyimpanan abu, 5 tabung gas elpiji ukuran 50kg, genset 5.000 watt dan kereta jenazah.



KR-Istimewa

(Has)-f **Bupati menandatangani prasasti peresmian krematorium.**

REHAB SALURAN AIR SAMPAI PENYEDIAAN BRONJONG DPUPKP Sleman Siap Sambut Musim Hujan

SLEMAN (KR) - Anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman tahun ini dipangkas separuhnya imbas pandemi Covid-19. Namun kondisi tersebut tak mengurangi kesiapan DPUPKP Sleman mengantisipasi musim hujan.

Menurut Kepala DPUPKP Sleman Taufiq Wahyudi, anggaran murni (belanja langsung) DPUPKP Sleman Tahun 2020 sekitar Rp 414 miliar. Namun terkena rasionalisasi anggaran pada bulan April kemarin sebesar Rp 233 miliar. Sehingga anggaran revisi yang dilaksanakan oleh DPUPKP tinggal Rp 181 miliar atau separuhnya.

"Pengurangan anggaran ini otomatis mengurangi jumlah paket pekerjaan di tiap bidang. Semisal di Bidang Bina Marga dari 105 paket menjadi 21 paket, Bidang Cipta Karya dari 65 paket menjadi 52 paket, Bidang Sumber Daya Air dari 195 paket tinggal 2 paket, Bidang P3B masih sama yakni 4 paket, Bidang



KR-Hasto Sutadi

Taufiq Wahyudi

Perumahan dari 71 paket menjadi 34 paket," jelas Taufiq kepada wartawan di Pendapa Parasamya Setda Sleman, Selasa (13/10).

Meski ada pemotongan anggaran, namun untuk beberapa paket yang sudah kontrak dan telah dilaksanakan atau dalam proses pelaksanaan tetap jalan terus. Seperti di Bidang Bina Marga yakni peningkatan

Jalan Paket 9 Ruas Jalan Kaliduren-Sumber, pemeliharaan berkala Jalan KRT Pringgodingrat, pemeliharaan berkala Jalan Merbabu, pemeliharaan berkala Jalan Turgo dan peningkatan Jembatan Ngipik.

Sementara untuk Bidang Cipta Karya tetap melaksanakan pembangunan Gedung DPRD Sleman, pembangunan Gedung Setda Sleman (Kantor Bupati) Lanjutan, pembangunan Ruang Gamelan, UPK, PKH, KPU, Pramuka dan Parkir Kapanewon Godean, dan peningkatan SPAM dan saluran drainase di sejumlah kalurahan.

"Untuk Anggaran Perubahan atau Anggaran Belanja Tambahan, DPUPKP akan lebih fokus digunakan untuk antisipasi musim hujan. Seperti rehab saluran irigasi, pembuatan bronjong untuk daerah rawan longsor. Kami juga memaksimalkan sumber daya manusia yang ada untuk membersihkan saluran air yang sering mampet saat musim hujan," tambah Taufiq. (Has) -f

Baliho Paslon Tak Pengaruhi Penerimaan Pajak

SLEMAN (KR) - Memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, banyak pasangan calon (paslon) yang mempromosikan diri melalui reklame atau billboard. Namun banyaknya reklame atau billboard di ruas jalan ini tidak berpengaruh terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor reklame.



KR-Mahar Prastiwi

Rodentus Condrosulistyo

Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Rodentus Condrosulistyo menerangkan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pajak Reklame, reklame dengan konten para paslon Pilkada termasuk pengecualian. Sehingga banyaknya reklame yang berisi paslon Pilkada tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan dari sektor pajak reklame.

"Perda tersebut berisi beberapa objek yang tidak termasuk sebagai objek pajak. Sesuai dengan pasal 3, reklame yang diselenggarakan dalam rangka sosial, keagamaan, politik dan kebudayaan yang bersifat tidak mencari keuntungan tidak dipungut pajak," beber Condrosulistyo saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (13/10).

Disinggung soal potensi pajak yang bisa diperoleh dari reklame selama Pilkada, Condrosulistyo enggan merinci. Pasalnya pajak

dari sebuah reklame atau billboard tergantung letaknya. Apakah di ruas jalan kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. "Misalnya kalau di Sleman, batas Kota hingga Jombor itu termasuk kelas 1 sehingga pajaknya tinggi. Sedangkan Jombor hingga Pasar Sleman termasuk kelas 2. Terkait reklama Pilkada ini, pemasangan iklan langsung berhubungan dengan vendor atau pemilik papan reklame atau billboard," terang Condrosulistyo.

Diungkapkan, jumlah billboard dengan ukuran kurang dari 25 meter di Sleman ada sebanyak 1.030, billboard dengan ukuran lebih dari 25 meter sebanyak 74. Sedangkan shopsign dan lain-lain sebanyak 371. Condrosulistyo mengaku, pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor pajak reklame.

"Tahun 2020, ditargetkan dari pajak reklame bisa mendapatkan Rp 9,5 miliar. Setelah ada pandemi, ada perubahan target diturunkan menjadi Rp 6 miliar. Realisasi per September kemarin, dari sektor pajak reklame sudah mendapatkan Rp 5,9 miliar. Sehingga target Rp 6 miliar tahun 2020 ini bisa tercapai. Namun selama pandemi ini banyak berkurang. Biasanya banyak yang promo event musik, diskon besar-besaran, sekarang tidak ada," imbuh Condrosulistyo. (Aha)-f

LELANG MASIH DALAM PROSES Tahun Ini, Pembangunan Pasar Hewan Godean

SLEMAN (KR) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman menargetkan tahun ini pembangunan Pasar Hewan dan Hobiis Godean tahap I dapat dilaksanakan. Sekarang ini masih dalam tahap proses lelang di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Sleman.

Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sleman Haris Martapa SE MT menjelaskan, pasar hewan dan hobiis ini akan dibangun di lahan sekitar 2.000 meter persegi. "Lokasinya di dekat Pasar Induk Pasar Godean," ujarnya kepada KR, Selasa (13/10).

Dikatakan, untuk tahap I ini sekarang masih dalam tahap proses lelang di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Sleman. Diharapkan setelah ada pemenang lelang, proses pengerjaan fisik dapat segera dilaksanakan. "Rencananya pembangunan pasar

hewan dan hobiis ini dilaksanakan dua tahap. Untuk tahap pertama tahun ini dan tahap kedua tahun berikutnya," terang Haris.

Disinggung tentang pembangunan Pasar Induk Godean, Haris mengaku, untuk saat ini proses lelang Penyusunan Detail Engineering Design (DED). Penyusunan DED ini merupakan tindak lanjut dari hasil sayembara desain Pasar Godean beberapa waktu lalu.

Terpisah, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Sleman Mirza Anfansury ST MT mengatakan, untuk pagu proyek pembangunan Pasar Hewan dan Hobiis Godean sekitar Rp 800 juta. Sedangkan untuk lelang penyusunan DED sekitar Rp 525 juta. "Target kami, akhir bulan ini sudah ada pemenang lelang. Kemudian langsung mengerjakan fisik pembangunan," jelasnya. (Sni) -f

JAGA SOLIDARITAS NU DAN KATOLIK Pengasuh Ponpes Al Qodir Kunjungi Seminari



KR-Saifullah Nur Ichwan

Kiai Masrur bersama para romo dan frater di Seminari Tinggi Santo Paulus.

SLEMAN (KR) - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Qodir Kiai Masrur Ahmad berkunjung ke Seminari Tinggi Santo Paulus, Selasa (13/10). Silaturahmi itu untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan warga Katolik.

"Kunjungan ini untuk menjaga solidaritas dan kerukunan umat, khususnya warga NU dengan Ka-

tolik. Harapannya kerukunan ini akan terus terjaga. Soalnya para romo sering berkunjung ke ponpes," kata Kiai Masrur saat berkunjung di Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan.

Menurutnya, kunjungan itu untuk membahas tentang kesejahteraan dan permasalahan umat. Mengingat semua agama mengajarkan semua umatnya untuk berbaik antarses-

ma. "Tugas kita di dunia itu berbuat baik dengan sesama. Kami ingin mengajak warga Katolik untuk bersama-sama berbuat untuk kesejahteraan dan permasalahan umat," ujarnya.

Sementara Menteri Seminari Tinggi Santo Paulus Romo Ignatius Fajar Kristianto didampingi Romo Suryonugroho menyambut baik kunjungan dari Pengasuh Ponpes Al Qodir. Pihaknya mengusulkan nanti ada kurikulum bersama atau ekstra kurikulum bersama antara santri dengan frater Seminari Tinggi Santo Paulus.

"Kami ingin nanti ada kegiatan bersama-sama untuk kemasyarakatan melalui kurikulum bersama. Dan kebersamaan itu yang sangat kami rindukan dengan para santri karena kami sudah sering melakukan 'live in' bersama santri," katanya. (Sni) -f

Kedaulatan Rakyat

EPAPER

www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggaman tangan Anda. Sekarang.